

MODEL PENDAMPINGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT PESISIR BERBASIS MODAL SOSIAL DI SEKITAR PELABUHAN PT ARUTMIN INDONESIA-NPLCT

Received : 13-04-2026 Revised : 27-04-2026 Accepted : 04-05-2026

Nyimas Nadya Izana¹, Anik Susanti², Bai'aturohani³

^{1,2,3}Departemen Sosiologi, Universitas Brawijaya

nyimasnadya@ub.ac.id¹

ABSTRAK

Masyarakat pesisir di sekitar Pelabuhan batubara PT Arutmin Indonesia-NPLCT di Desa Sarang Tiung menghadapi kerentanan sosial ekonomi berupa ketergantungan nelayan pada lemahnya kelembagaan lokal, serta terbatasnya akses terhadap peluang pemberdayaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis modal sosial yang dimiliki masyarakat dan merumuskan model awal strategi pemberdayaan berbasis modal sosial yang relevan dengan konteks Desa Sarang Tiung. Pendekatan kualitatif partisipatif digunakan melalui kombinasi Participatory Rural Appraisal (PRA), Focus Group Discussion (FGD), dan pemetaan sosial yang diadaptasi untuk memetakan jaringan kepercayaan, relasi kekuasaan, dan posisi aktor kunci dalam sistem sosial-ekonomi pesisir. Temuan penelitian menunjukkan adanya modal sosial kuat berupa solidaritas, kerja sama, dan norma lokal antar kelompok, namun terhambat oleh rendahnya literasi keuangan, ketergantungan ekonomi pada penadah, peran pemuda dan perempuan yang belum optimal, serta keterbatasan akses pasar. Penelitian ini menghasilkan prototipe model berbasis modal sosial yang menempatkan kelembagaan nelayan sebagai node utama jejaring kolaborasi desa lembaga pendidikan mitra eksternal dan menjadi landasan bagi perancangan program pemberdayaan yang berkelanjutan di kawasan pesisir sekitar pelabuhan.

Kata kunci: Masyarakat Pesisir, Pelembagaan Masyarakat, Modal Sosial

ABSTRACT

Coastal communities living around PT Arutmin Indonesia-NPLCT coal port in Sarang Tiung Village face socio-economic vulnerabilities in the form of fishermen's dependence on intermediaries, weak local institutions, and limited access to empowerment opportunities. This study aims to analyze the social capital of the community and to formulate an initial model of a social capital-based empowerment strategy that is relevant to the context of Sarang Tiung Village. A participatory qualitative approach was employed by combining Participatory Rural Appraisal (PRA), Focus Group Discussion (FGD), and social mapping, which were adapted to map networks of trust, power relations, and the positions of key actors within the coastal socio-economic system. The findings reveal strong social capital in the form of solidarity, cooperation, and local norms across groups, but this is constrained by low financial literacy, economic dependence on middlemen, the sub-optimal roles of youth and women, and limited market access. This study produces a prototype social capital-based model that positions fishermen's organizations as the main node in a collaboration network linking the village, educational institutions, and external partners, and serves as a foundation for designing sustainable empowerment programs in coastal areas surrounding the port.

Keywords: Coastal Communities, Community Institutionalization, Social Capital

^{2,3} Universitas Brawijaya, anikusanti@ub.ac.id, baininot95@gmail.com

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi kelompok yang menggantungkan mata pencahariannya pada sektor kelautan dan perikanan. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, menghadapi tantangan kompleks dalam mengelola masyarakat pesisir yang sering kali diwarnai kerentanan ekonomi, keterbatasan akses terhadap modal, serta rendahnya nilai tambah produk kelautan (Kusnadi 2000). Sebagian besar nelayan masih menghadapi masalah struktural seperti ketergantungan pada pengepul, fasilitas produksi yang terbatas, fluktuasi hasil tangkapan, serta keterlibatan yang minim dalam rantai nilai perikanan yang lebih menguntungkan (Satria Arif 2015). Kondisi-kondisi ini tidak terpisahkan dari lemahnya lembaga-lembaga ekonomi dan sosial yang berperan dalam memperkuat kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian. Desa Sarang Tiung merupakan salah satu kawasan pesisir di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, di mana sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan bagan dan menjadi salah satu desa binaan PT Arutmin Indonesia–NPLCT. Penangkapan ikan dengan jaring bagan memiliki karakteristik unik karena membutuhkan modal yang besar dan melibatkan kerja sama sosial dalam pelaksanaannya. Namun, meski sumber daya lautnya berpotensi tinggi, masyarakat nelayan di desa ini masih berada dalam kondisi ekonomi yang rentan. Berdasarkan pengamatan dan wawancara, nelayan Sarang Tiung hanya dapat melaut secara optimal selama sembilan bulan dalam setahun, sedangkan tiga bulan lainnya merupakan musim berangin yang menghambat penangkapan ikan. Ketidakstabilan pendapatan ini memperburuk kondisi ekonomi rumah tangga nelayan, terutama karena sebagian besar tidak memiliki keterampilan merencanakan keuangan atau mendiversifikasi pendapatan (Rabbaniyah et al. 2025).

Kehadiran PT Arutmin Indonesia – Nort Pulau Laut Coal Terminal (NPLCT) di sekitar Desa Sarang Tiung turut membentuk dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat pesisir. Sebagai perusahaan yang menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan, PT Arutmin Indonesia–NPLCT telah melaksanakan berbagai program untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun, efektivitas program-program tersebut sangat bergantung pada tingkat keselarasan antara inisiatif perusahaan dan kebutuhan nyata masyarakat, termasuk penguatan potensi lokal dan pemanfaatan modal sosial yang telah terbina. Dalam konteks ini, keterlibatan PT Arutmin Indonesia–NPLCT dipandang sebagai peluang strategis untuk mengembangkan model pemberdayaan masyarakat yang lebih berkelanjutan, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan (Prapti 2021)

Tantangan lain yang menonjol adalah ketergantungan nelayan pada pengumpul sebagai penyedia modal untuk alat tangkap sekaligus pembeli tunggal hasil tangkapan. Pola hubungan patron–klien ini membuat nelayan tidak memiliki kebebasan menentukan harga jual maupun memilih pasar alternatif yang lebih menguntungkan (Indrawasih, 2018). Tingkat ketergantungan ekonomi yang tinggi tersebut melemahkan daya tawar nelayan dan memerangkap mereka dalam lingkaran kemiskinan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan semacam ini merupakan masalah struktural lama di masyarakat

pesisir dan membutuhkan intervensi yang terarah dan berbasis konteks lokal (Azizah and Haning 2025; Wibowo et al. 2025).

Selain problem ekonomi, masyarakat Sarang Tiung juga menghadapi kendala kelembagaan. Kelompok nelayan memang telah dibentuk, namun belum didukung struktur organisasi yang kuat, dan partisipasi anggota belum merata. Keterlibatan kaum muda masih rendah, administrasi kelompok belum terorganisir dengan baik, dan peraturan lokal mengenai jarak antar platform penangkapan ikan serta pengelolaan wilayah tangkap masih bersifat informal, sehingga berpotensi menimbulkan konflik di masa depan apabila tidak diformalkan. Padahal keberadaan lembaga lokal yang kuat krusial untuk mendukung pengambilan keputusan kolektif dan meningkatkan daya tawar masyarakat dalam menghadapi dinamika pasar maupun perubahan lingkungan (Handoko, Fitriyana, and Susilo 2022).

Di sisi lain, masyarakat Desa Sarang Tiung memiliki modal sosial yang kuat yang berpotensi menjadi aset penting dalam pengembangan kapasitas masyarakat pesisir. Modal sosial dalam bentuk ikatan, seperti gotong royong, solidaritas di antara nelayan, dan saling percaya, masih terjaga dengan baik. Norma-norma lokal seperti aturan jarak 200meter antar platform penangkapan ikan, yang telah dipraktikkan selama beberapa generasi, mencerminkan mekanisme sosial yang efektif untuk menjaga keharmonisan dan mencegah konflik. Putnam menegaskan bahwa modal sosial merupakan landasan penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kerja sama, kepercayaan, dan jaringan social (Putnam 2000). Dalam konteks masyarakat pesisir, modal sosial tidak hanya memelihara hubungan antarnelayan, tetapi juga mendukung adaptasi terhadap risiko lingkungan dan ketidakpastian hasil tangkapan (Adger 2003). Modal sosial dapat memperkuat kemampuan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengelola sumber daya, meningkatkan efisiensi kerja, serta memfasilitasi pembentukan lembaga lokal yang Tangguh (Claridge Tristan 2018).

Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa modal sosial masyarakat pesisir sering kali tidak terhubung dengan jaringan eksternal yang lebih luas, sehingga modal sosial jembatan dan penghubung tidak berkembang dan berdampak pada lambatnya proses pemberdayaan (Didi 2022). Temuan lapangan di Sarang Tiung juga menunjukkan bahwa modal sosial masyarakat belum dimanfaatkan secara optimal untuk memperkuat perekonomian maupun mengembangkan pariwisata desa. Potensi wisata edukasi, seperti aktivitas bagan, ekowisata mangrove, memancing, pemandangan matahari terbit, dan kuliner pesisir memiliki nilai jual tinggi apabila dikelola secara sistematis. Kehadiran wisatawan dari daerah lain mengindikasikan daya tarik kawasan ini, tetapi kurangnya promosi digital, ketiadaan paket wisata yang terstandarisasi, dan lemahnya pengorganisasian kegiatan pariwisata menghambat pengembangan potensi tersebut (Risidiana Putri et al. 2024). Selain itu, Kampung Nelayan yang dibangun di atas tanah dengan kontrak berjangka waktu terbatas menimbulkan kekhawatiran mengenai kepastian hak atas tanah dan ruang hidup warga.

Mengingat berbagai tantangan tersebut, mengidentifikasi kebutuhan sosial masyarakat menjadi langkah mendasar dalam merancang program pemberdayaan yang relevan dan berkelanjutan. Pendekatan berbasis

kebutuhan penting untuk memastikan bahwa program yang dikembangkan benar-benar menjawab masalah nyata yang dihadapi masyarakat (Petter M. Kettner, Robert M. Moroney, and Lawrence L. Martin 2017). Dalam konteks Sarang Tiung, kebutuhan utama meliputi stabilitas pendapatan rumah tangga, literasi keuangan, akses pasar yang lebih adil, penguatan lembaga nelayan, keterlibatan kaum muda, pengembangan pariwisata berbasis pengalaman, serta kepastian hak atas tanah. Mengidentifikasi kebutuhan tersebut dengan bertumpu pada modal sosial merupakan langkah strategis agar kekuatan sosial masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses pemberdayaan, karena modal sosial sebagai sumber daya kolektif memungkinkan masyarakat mengorganisir diri, membangun jaringan, dan menciptakan solusi bersama (Lin 2017).

Namun, kajian yang secara spesifik menelaah bagaimana kebutuhan sosial dan modal sosial masyarakat pesisir di desa wisata yang berada di sekitar pelabuhan batubara dirumuskan sebagai dasar pengembangan model pemberdayaan masih terbatas. Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi kebutuhan sosial utama masyarakat Desa Sarang Tiung, dan (2) menganalisis bentuk-bentuk modal sosial yang dapat dijadikan landasan dalam merancang strategi pemberdayaan masyarakat pesisir yang berkelanjutan di sekitar Pelabuhan PT Arutmin Indonesia–NPLCT. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif melalui *Participatory Rural Appraisal* (PRA), *Focus Group Discussion* (FGD), dan pemetaan sosial yang dilaksanakan bersama masyarakat pada Juni 2025.

METODE PENELITIAN

Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan mengintegrasikan metode Penilaian Pedesaan Partisipatif (*Participatory Rural Appraisal*/PRA), Diskusi Kelompok Terfokus (*Focus Group Discussion*/FGD), dan pemetaan sosial. Pendekatan ini dipilih karena selaras dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan masyarakat pesisir berdasarkan modal sosial sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat pada setiap tahapan. Pendekatan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus mitra dalam proses pengumpulan data, analisis, dan perumusan kebutuhan (Chambers 1994). sehingga kegiatan ini tidak hanya menghasilkan data, tetapi juga membangun kemampuan reflektif masyarakat dalam memahami kondisi sosial-ekonomi mereka.

Kegiatan dilaksanakan di Kampung Nelayan, RT 03, Desa Sarang Tiung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, pada minggu pertama bulan Juni 2025. Lokasi ini dipilih karena memiliki karakteristik sosial ekonomi sebagai masyarakat pesisir yang sangat bergantung pada sektor perikanan bagan serta memiliki potensi pengembangan wisata memancing berbasis pengalaman. Wilayah ini juga menghadapi tantangan struktural berupa ketergantungan pada pengepul, ketidakpastian status tanah, dan lemahnya lembaga ekonomi masyarakat..

Sasaran kegiatan adalah anggota komunitas nelayan Kampung Nelayan yang terdiri dari 76 rumah tangga dengan struktur sosial yang relatif homogen. Dari populasi ini dipilih 12 partisipan sebagai anggota di Kampung Nelayan secara purposif untuk terlibat intensif dalam rangkaian PRA, FGD, dan pemetaan

sosial, yang mewakili nelayan pemilik bagan, nelayan buruh, perempuan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemuda desa, dan tokoh masyarakat. Komposisi 12 orang dipertimbangkan agar dinamika diskusi tetap intensif sekaligus memunculkan keberagaman pandangan dalam satu kelompok, sehingga hasil identifikasi kebutuhan dan modal sosial lebih merepresentasikan kondisi sosial secara menyeluruh.

Pelaksanaan kegiatan mengikuti beberapa tahapan utama. Tahap pertama adalah penjajakan awal dan pemetaan pemangku kepentingan melalui wawancara dengan pemerintah desa, pengurus komunitas nelayan, dan perwakilan tokoh lokal untuk mengidentifikasi isu utama dan memastikan dukungan kelembagaan. Tahap kedua berupa pelaksanaan PRA dalam satu sesi intensif yang melibatkan 12 partisipan untuk menggali pengetahuan lokal dan persepsi mengenai kondisi sosial, ekonomi, serta kelembagaan. Tahap ketiga adalah FGD dan pemetaan sosial yang dilakukan dalam dua kali pertemuan lanjutan guna memperdalam temuan PRA dan menyusun peta hubungan antaraktor. Tahap keempat adalah validasi temuan dan perumusan rekomendasi kebutuhan serta prototipe model pemberdayaan berbasis modal sosial bersama perwakilan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan yang menekankan pembelajaran melalui praktik dan kolaborasi aktif (Aprillia Theresia et al., 2014).

Penilaian Pedesaan Partisipatif (PRA) digunakan untuk menggali pengetahuan lokal dan persepsi masyarakat mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan kelembagaan. Secara akademik, PRA dipilih karena menekankan partisipasi aktif warga dalam proses identifikasi masalah, analisis, dan perumusan solusi, sehingga relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat pesisir yang kaya pengetahuan lokal dan norma informal. PRA juga memungkinkan penggunaan berbagai alat visual dan partisipatif yang mempermudah masyarakat mengekspresikan pengalaman dan penilaiannya atas perubahan sosial. Teknik PRA yang digunakan meliputi: (a) diagram kelembagaan untuk memetakan aktor internal dan eksternal yang memengaruhi kehidupan nelayan; (b) kalender musiman untuk memahami pola musim penangkapan ikan, musim paceklik, dan periode cuaca ekstrem; serta (c) garis waktu untuk mengidentifikasi sejarah pembentukan Kampung Nelayan dan perubahan sosial yang menyertainya. Keterlibatan aktif masyarakat dalam penyusunan alat-alat ini memastikan bahwa kebutuhan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kondisi riil



Gambar 1. Identifikasi kebutuhan para nelayan

Diskusi Kelompok Terfokus (FGD) diselenggarakan untuk menggali pandangan bersama mengenai kebutuhan sosial, faktor-faktor yang menghambat kesejahteraan, serta potensi modal sosial yang dapat dikembangkan. FGD dilaksanakan dalam dua sesi, masing-masing tetap melibatkan 12 partisipan dengan penekanan pada kelompok nelayan dan perwakilan perempuan-pemuda, untuk menciptakan ruang diskusi yang lebih terfokus dan setara. FGD dipandu oleh daftar pertanyaan terbuka yang disusun berdasarkan tujuan kegiatan dan kerangka analisis modal sosial (*bonding, bridging, linking*) sehingga diskusi terarah pada hubungan antaraktor, praktik gotong royong, jaringan dukungan, dan akses terhadap lembaga eksternal (Claridge Tristan 2018).

Pemetaan sosial digunakan untuk mengidentifikasi dinamika kegiatan ekonomi nelayan dan hubungan kelembagaan melalui penyusunan peta sosial kampung, jaringan pemasaran hasil tangkapan, serta kalender musim penangkapan ikan. Teknik ini memetakan lokasi tempat tinggal nelayan, posisi sarana produksi, hubungan antara nelayan dan pengumpul, musim penangkapan, musim sepi, dan kondisi cuaca ekstrem yang menentukan intensitas kerja nelayan. Pemahaman terhadap ritme musim tersebut menjadi landasan analitis dalam merumuskan bentuk-bentuk intervensi pemberdayaan yang realistis dan selaras dengan mata pencaharian masyarakat pesisir

Data yang diperoleh dari PRA, FGD, dan pemetaan sosial didokumentasikan melalui catatan lapangan, rekaman audio, foto kegiatan, peta sosial, dan diagram kelembagaan. Analisis data dilakukan dengan pendekatan analisis tematik, dimulai dari proses transkripsi dan penulisan ulang catatan lapangan, pengkodean terbuka terhadap jawaban dan diskusi partisipan, pengelompokan kode ke dalam tema-tema utama (kebutuhan sosial, bentuk-bentuk modal sosial, hubungan patron–klien, potensi pariwisata, dan isu hak atas tanah), hingga penafsiran tematik yang menghubungkan kebutuhan sosial dengan modal sosial yang tersedia. Hasil pemetaan sosial dan diagram kelembagaan kemudian dibandingkan dengan temuan FGD untuk mengidentifikasi aktor kunci, kekuatan dan kelemahan jejaring, serta titik-titik strategis yang berpotensi menjadi fokus intervensi pemberdayaan.

Pada tahap ini, indikator keberhasilan difokuskan pada luaran proses dan kapasitas, bukan pada perubahan ekonomi jangka panjang. Indikator tersebut meliputi: (1) tersusunnya peta kebutuhan sosial dan peta modal sosial yang disepakati bersama partisipan; (2) meningkatnya pemahaman partisipan terkait pola

ketergantungan ekonomi dan alternatif pengelolaan keuangan rumah tangga nelayan; (3) teridentifikasinya struktur kelembagaan nelayan dan aktor penghubung yang potensial menjadi basis forum nelayan; serta (4) dirumuskannya prototipe model pemberdayaan berbasis modal sosial yang dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah desa, program CSR PT Arutmin Indonesia–NPLCT, dan pengabdian lanjutan dari perguruan tinggi.

Untuk menjamin keberlanjutan pasca-kegiatan, hasil pemetaan dan rekomendasi model pemberdayaan disampaikan dan didiskusikan dengan Pemerintah Desa Sarang Tiung, pengurus kelompok nelayan, dan perwakilan tokoh masyarakat. Rekomendasi diarahkan agar dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan desa dan menjadi masukan bagi desain program CSR perusahaan. Selain itu, beberapa tokoh lokal dan perwakilan pemuda didorong untuk berperan sebagai penggerak (*champion*) dalam menindaklanjuti hasil kegiatan, sehingga keberlanjutan inisiatif tidak sepenuhnya bergantung pada kehadiran tim pelaksana, tetapi bertumpu pada kapasitas dan komitmen komunitas sendiri.

KERANGKA TEORI/KONSEP

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Didi 2022). Dalam konteks masyarakat pesisir, pemberdayaan menjadi sangat penting karena kelompok nelayan umumnya berada dalam kondisi rentan secara ekonomi dan sosial. Kerentanan ini ditandai dengan ketergantungan pada sumber daya alam yang tidak stabil, keterbatasan akses terhadap pasar, serta rendahnya kemampuan pengelolaan ekonomi rumah tangga. Kondisi tersebut juga terlihat pada masyarakat nelayan di Desa Sarang Tiung yang menghadapi fluktuasi pendapatan akibat musim melaut serta keterbatasan akses terhadap peluang ekonomi (Wibowo et al. 2025).

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya berfokus pada bantuan ekonomi semata, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas, peningkatan akses terhadap sumber daya, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep pemberdayaan yang menekankan pentingnya partisipasi dan penguatan kemampuan lokal dalam menciptakan keberlanjutan (Rogers et al. 1995). Melalui proses pemberdayaan, masyarakat diharapkan mampu mengelola potensi lokal secara optimal, termasuk dalam pengembangan usaha berbasis perikanan dan potensi wisata pesisir.

Sejalan dengan itu, modal sosial menjadi faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pemberdayaan masyarakat. Robert D. Putnam mendefinisikan modal sosial sebagai jaringan, norma, dan kepercayaan yang memfasilitasi koordinasi serta kerja sama untuk keuntungan bersama. Konsep ini juga diperkuat oleh Michael Woolcock dan Deepa Narayan yang menyatakan bahwa modal sosial berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat (Putnam 1995).

Dalam komunitas nelayan, modal sosial tercermin dalam praktik gotong royong, solidaritas, serta hubungan sosial yang erat antaranggota masyarakat. Temuan di Desa Sarang Tiung menunjukkan bahwa bentuk modal sosial bonding masih kuat, namun belum diimbangi dengan pengembangan bridging dan

linking social capital. Hal ini menyebabkan masyarakat masih mengalami keterbatasan dalam akses pasar dan peluang ekonomi yang lebih luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa modal sosial yang ada belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai sumber daya strategis untuk meningkatkan kesejahteraan.

Oleh karena itu, penguatan dan optimalisasi modal sosial menjadi langkah penting dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat pesisir. Melalui pengembangan jaringan sosial yang lebih luas, peningkatan kepercayaan, serta penguatan kelembagaan lokal, masyarakat diharapkan mampu keluar dari ketergantungan struktural dan membangun sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Sarang Tiung

Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa rumah tangga nelayan di Desa Sarang Tiung, khususnya di Kampung Nelayan RT 03, sangat bergantung pada penangkapan ikan bagan sebagai sumber pendapatan utama. Kegiatan melaut berlangsung sekitar sembilan bulan per tahun, sementara tiga bulan lainnya merupakan musim sepi akibat angin kencang dan gelombang tinggi, sehingga sebagian besar nelayan menghentikan aktivitas penangkapan. Pola musiman ini menyebabkan pendapatan rumah tangga berfluktuasi tajam dan berimplikasi pada strategi pengelolaan ekonomi, yang cenderung bersifat jangka pendek dan konsumtif. Temuan ini mengonfirmasi hasil penelitian sebelumnya mengenai kerentanan mata pencaharian nelayan akibat perubahan cuaca dan fluktuasi hasil tangkapan (Firdaus, Apriliani, and Wijaya 2015). Dalam konteks Sarang Tiung, ketidakstabilan pendapatan ini diperparah oleh keterbatasan akses pasar dan ketergantungan pada pengepul yang memiliki kendali penuh atas modal dan harga jual.

Tabel 1. Kondisi Ekonomi Rumah Tangga Nelayan

No	Aspek Ekonomi	Temuan Utama
1	Musim melaut	9 bulan aktif, 3 bulan tidak melaut
2	Sumber pendapatan	Utama dari penangkapan ikan bagan
3	Pola pendapatan	Tidak stabil, sangat bergantung musim
4	Pengelolaan keuangan	Cenderung konsumtif, minim perencanaan dan tabungan
5	Akses pasar	Sangat tergantung pada pengepul

Sumber: Data Peneliti, 2025

Data dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa data ini mengonfirmasi kerentanan mata pencaharian nelayan yang sangat dipengaruhi faktor alam dan struktur pasar, sebagaimana disorot dalam studi-studi sebelumnya tentang livelihood nelayan di Indonesia yang menunjukkan hubungan kuat antara ketidakpastian musim, fluktuasi hasil tangkapan, dan kerentanan ekonomi rumah tangga pesisir.

Identifikasi Kebutuhan Sosial Berdasarkan Modal Sosial

Kebutuhan sosial masyarakat diidentifikasi melalui gabungan PRA, FGD, dan pemetaan sosial yang melibatkan 12 partisipan dari unsur nelayan pemilik dan buruh, perempuan pelaku UMKM, pemuda, dan tokoh masyarakat. Analisis menunjukkan bahwa kebutuhan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan pendapatan, tetapi juga menyangkut penguatan kelembagaan, akses terhadap aset, dan pengembangan jaringan sosial di luar komunitas. Modal sosial ikatan (*bonding*) berupa solidaritas, gotong royong, dan

kepercayaan internal terbukti membantu keluarga nelayan bertahan dalam jangka pendek, namun belum diikuti dengan pengembangan modal sosial jembatan (*bridging*) dan penghubung (*linking*) yang diperlukan untuk memperluas peluang pemberdayaan. Modal sosial masyarakat, yang diklasifikasikan sebagai kuat dalam hal ikatan, jelas membantu mereka mengatasi masalah jangka pendek melalui solidaritas sosial, namun belum cukup untuk mendukung kebutuhan jangka panjang karena belum berkembang menjadi modal sosial jembatan dan penghubung (Woolcock and Narayan 2000).

Tabel 2. Kebutuhan Sosial Masyarakat Desa Sarang Tiung

No	Dimensi	Bentuk Kebutuhan Utama	Sumber Informasi
1	Ekonomi	Stabilitas pendapatan, pengurangan ketergantungan pada pengepul	FGD nelayan
2	Keuangan	Literasi keuangan, kebiasaan menabung, perencanaan rumah tangga	Wawancara istri nelayan
3	Kelembagaan	Penguatan kelompok nelayan, legalitas aturan lokal	Diagram kelembagaan (PRA)
4	Aset	Kepastian status tanah, akses alat tangkap	Wawancara pengurus kelompok
5	Pariwisata	Paket wisata edukasi, promosi digital	Pemetaan sosial
6	Sosial	Keterlibatan pemuda, regenerasi nelayan	FGD pemuda

Sumber: Data Peneliti, 2025

Tabel 2 menunjukkan bahwa kebutuhan yang paling mendesak terletak pada dimensi ekonomi dan kelembagaan. Ketergantungan pada pengepul berarti para nelayan tidak memiliki kendali atas harga jual. Hal ini sejalan dengan temuan-temuan mengenai hubungan patron-klien yang kuat di komunitas pesisir (Indrawasih R. 2018). Kebutuhan paling mendesak muncul pada dimensi ekonomi dan kelembagaan, terutama terkait ketergantungan pada pengepul serta ketiadaan lembaga ekonomi yang dikelola nelayan. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menempatkan kelemahan kelembagaan lokal sebagai salah satu penghambat transformasi modal sosial menjadi kekuatan ekonomi kolektif dalam komunitas nelayan.

Profil Modal Sosial: Kerja Sama, Solidaritas, dan Relasi Patron–Klien

Pemetaan modal sosial menunjukkan bahwa masyarakat nelayan Sarang Tiung memiliki modal sosial ikatan yang kuat. Nelayan bekerja sama dalam pembuatan jaring, perbaikan kapal, dan pembagian informasi lokasi ikan tanpa imbalan langsung; praktik gotong royong ini dikuatkan oleh norma resiprositas yang sudah mengakar. Mereka juga mematuhi norma informal jarak minimal antarbagian untuk mencegah konflik penangkapan, yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial internal. Di sisi lain, hubungan dengan pengepul (tengkulak/patron) menunjukkan bentuk modal sosial penghubung yang bersifat ambivalen. Modal usaha, pinjaman konsumsi, dan akses pasar hampir sepenuhnya dimediasi oleh pengepul, sehingga nelayan memiliki keterikatan ekonomi dan sosial yang kuat kepada pihak tersebut. Bagi sebagian nelayan, hubungan ini dipersepsikan sebagai bentuk tolong-menolong yang memberikan rasa aman pada musim paceklik, tetapi sekaligus menempatkan mereka dalam posisi tawar yang lemah dalam penentuan harga dan pilihan pasar.

Tabel 3. Bentuk-bentuk Modal Sosial di Masyarakat Sarang Tiung

Aspek Modal Sosial		
No	Sosial	Temuan Lapangan (Contoh Praktik)
1	Kerja sama	Pembuatan jaring bersama, perbaikan kapal kolektif
2	Solidaritas	Saling membantu pada musim paceklik, berbagi hasil tangkapan kecil
Norma		
3	resiprositas	Balas bantuan dalam bentuk tenaga/ikan ketika situasi membaik
4	Bonding	Kepatuhan terhadap aturan jarak antarbagian, pertemuan kelompok nelayan
5	Linking positif	Relasi dengan perangkat desa dan lembaga pendidikan (masih terbatas)
6	Linking negatif	Ketergantungan pada pengepul sebagai penyedia modal dan pembeli utama

Sumber: Data Peneliti, 2025

Penafsiran Tabel 3 menunjukkan bahwa Temuan ini selaras dengan studi fenomenologis tentang modal sosial nelayan yang menemukan bahwa kerja sama, solidaritas, dan saling ketergantungan merupakan ciri utama kehidupan sosial nelayan, namun belum selalu mampu ditransformasikan menjadi peningkatan kesejahteraan ketika tidak didukung kelembagaan yang memadai. Menurut Putnam (Putnam 2000), Keberhasilan suatu komunitas bergantung pada keseimbangan antara modal sosial ikatan, jembatan, dan penghubung. Kurangnya modal sosial jembatan juga terlihat dari minimnya kerja sama dengan pihak eksternal dalam pengembangan pariwisata. Wilayah ini memiliki potensi besar untuk pariwisata edukasi yang didasarkan pada pengalaman para nelayan.

Masalah Struktural: Ketergantungan pada Pengepul

Diskusi kelompok menunjukkan bahwa hampir semua nelayan bergantung pada pengepul untuk memperoleh modal operasional dan menjual hasil tangkapan. Pengepul biasanya menentukan harga beli sepihak dengan selisih harga yang signifikan dibanding harga pasar, sehingga margin keuntungan nelayan menjadi sangat terbatas. Utang alat tangkap dan pinjaman konsumsi dibayar dengan cara memotong hasil penjualan ikan, yang membuat nelayan sulit melepaskan diri dari relasi tersebut. Bagi nelayan, hubungan ini tidak semata-mata bersifat ekonomi, tetapi juga sosial. Pengepul seringkali dipandang sebagai pihak yang “menolong” ketika musim paceklik, misalnya dengan memberikan pinjaman darurat untuk kebutuhan harian atau biaya pendidikan anak. Pola ini memperkuat dimensi emosional dan moral dari hubungan patron–klien, sehingga meskipun merugikan dari sisi harga, nelayan tetap bertahan dalam relasi tersebut. Kondisi ini menegaskan relevansi teori patron-klien, yang memposisikan nelayan sebagai pihak subordinat dalam struktur pasar (Satria Arif 2015). Ketergantungan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial, karena hal itu menimbulkan kewajiban moral yang mengikat mereka untuk terus bekerja bagi pengepul yang sama.

Peluang Pengembangan Pariwisata Berbasis Modal Sosial

Pemetaan sosial mengidentifikasi beberapa potensi pariwisata berbasis pengalaman, seperti wisata bagan,

ekowisata mangrove, pemandangan matahari terbit, dan kuliner pesisir yang dikelola oleh perempuan. Beberapa konten promosi di media sosial telah dibuat secara sporadis oleh pemuda desa, namun belum terkelola secara sistematis. Kondisi ini menunjukkan adanya cikal bakal modal sosial jembatan antara komunitas nelayan dan pengunjung luar, yang dapat diperkuat melalui pengorganisasian kelembagaan dan peningkatan kapasitas pemasaran digital. Di sisi kelembagaan, kelompok nelayan sudah terbentuk tetapi belum memiliki struktur organisasi yang kuat maupun aturan tertulis mengenai pengelolaan aset bersama, pengaturan jarak antarbagian, dan mekanisme negosiasi harga. Ketidakpastian status tanah Kampung Nelayan menambah kerentanan aset dan menurunkan insentif investasi jangka panjang. Situasi ini menegaskan kebutuhan akan penguatan kelembagaan lokal sebagai wadah formal untuk mengelola modal sosial yang telah ada dan menghubungkannya dengan mitra eksternal seperti pemerintah desa, perusahaan, dan lembaga keuangan. Namun, kurangnya strategi promosi digital menjadi hambatan utama bagi pengembangan pariwisata. Konten media sosial seperti TikTok dan Instagram memang sudah ada, tetapi pengelolaannya masih sporadis. Temuan ini sejalan dengan hasil studi (Risidiana Putri et al. 2024), yang menekankan pentingnya promosi digital dalam pengembangan desa-desa wisata.

Kebutuhan Institusional dan Kepastian Aset

Salah satu masalah krusial yang teridentifikasi dalam program pengabdian masyarakat adalah status lahan Kampung Nelayan, yang masih terikat kontrak selama sepuluh tahun. Warga mengutarakan kekhawatiran mereka mengenai masa depan kawasan tersebut jika pemilik lahan menarik kembali lahannya. Ketidakpastian ini memengaruhi motivasi investasi jangka panjang, termasuk pengembangan pariwisata dan perencanaan pemukiman. Pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini harus mencakup advokasi kelembagaan dan pengembangan kapasitas bagi masyarakat agar dapat bernegosiasi dengan pemilik lahan dan pemerintah desa.

PT Arutmin Indonesia-NPLCT memiliki potensi strategis sebagai mitra eksternal yang dapat mendukung penguatan kelembagaan dan keamanan aset masyarakat melalui inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang lebih terarah. Sebagai perusahaan yang beroperasi di sekitar komunitas nelayan, PT Arutmin Indonesia-NPLCT tidak hanya berperan dalam aspek makroekonomi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai mitra dalam mendorong pembangunan infrastruktur sosial, advokasi status tanah, serta dukungan terhadap program pemberdayaan yang dirancang bekerja sama dengan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, masyarakat dapat memperkuat modal sosialnya yang selama ini lemah, sehingga memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam berinteraksi dengan pemilik tanah, pemerintah desa, dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan pengelolaan ruang hidup dan pengembangan kawasan wisata. Menurut (Handoko et al. 2022), Lembaga-lembaga lokal yang kuat sangat penting bagi keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

PEMBAHASAN

1. Kalender Musiman, Kerentanan Livelihood, dan Modal Sosial Ikatan

Hasil pemetaan kalender musiman memperlihatkan bahwa struktur mata pencaharian nelayan Sarang Tiung sangat rentan terhadap fluktuasi musim, sehingga mereka menghadapi periode surplus dan defisit yang tajam dalam siklus tahunan. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menyoroti ketergantungan nelayan pada faktor alam dan volatilitas hasil tangkapan sebagai sumber utama kerentanan ekonomi.

Dalam kerangka modal sosial, kalender musiman memperlihatkan bagaimana kerja sama dan solidaritas internal berfungsi sebagai strategi adaptif untuk mengatasi ketidakpastian pendapatan. Pada masa sepi tangkapan, praktik gotong royong, berbagi makanan, dan dukungan kekerabatan menjadi mekanisme penting untuk menopang kebutuhan dasar rumah tangga. Hasil ini menguatkan temuan studi fenomenologis modal sosial nelayan yang menemukan bahwa kerja sama dan solidaritas menjadi ciri dominan interaksi sosial di komunitas pesisir.

Namun, ketergantungan yang besar pada modal sosial ikatan tanpa diimbangi modal sosial jembatan dan penghubung berpotensi menjerat komunitas dalam jebakan solidaritas, di mana jaringan internal kuat tetapi akses ke sumber daya eksternal seperti lembaga keuangan formal, koperasi, atau pasar alternatif tetap terbatas. Kondisi ini menjelaskan mengapa meskipun solidaritas tinggi, peningkatan kesejahteraan nelayan bersifat lambat dan sporadis. Hal ini sejalan dengan penelitian terkini yang menyatakan bahwa pemetaan musiman merupakan instrumen strategis dalam perencanaan program pemberdayaan karena dapat mengidentifikasi periode-periode kritis bagi rumah tangga nelayan (FAO 2015).

Table 1. Ringkasan Kalender Bulnan

Bulan	Kondisi Laut & Musim Angin	Aktivitas Nelayan / Hasil Laut	Keterangan Tambahan
Januari	Laut tenang, musim melaut	Aktivitas melaut Ikan teri, ikan tembang	Cuaca cukup mendukung
Februari	Musim ikan teri nasi	Puncak hasil ikan teri kecil	Harga jual cukup baik
Maret	Musim melaut aktif	Teri, cumi, ikan campuran	Aktivitas rutin
April	Musim melaut aktif	Hasil laut stabil	Aktivitas rutin
Mei	Hasil masih bagus	Ikan campuran, teri	Mulai persiapan ombak besar
Juni	Menjelang musim angin	Hasil tangkapan menurun	Perlu antisipasi paceklik
Juli	Musim angin/ombak besar	Tidak melaut	Paceklik dimulai
Agustus	Puncak ombak tinggi	Tidak melaut	Paling sulit, paceklik terparah
September	Ombak mulai reda, belum stabil	Aktivitas laut terbatas	Paceklik berakhir akhir bulan
Oktober	Laut kembali tenang	Mulai musim ikan teri nasi	Awal musim melaut kembali
November	Musim melaut aktif	Hasil laut meningkat	Puncak kegiatan nelayan
Desember	Musim melaut aktif	Ikan teri, tembang, cumi	Aktivitas rutin

Sumber: Data Olah Peneliti, 2025

2. Relasi Patron–Klien sebagai Modal Sosial yang Ambivalen

Relasi patron–klien antara nelayan dan pengepul di Sarang Tiung tidak dapat dipahami hanya sebagai eksploitasi ekonomi semata. Sejalan dengan kajian patron–klien di berbagai komunitas nelayan Indonesia, relasi ini juga mengandung unsur modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan norma resiprositas, di mana patron menyediakan modal, jaminan, dan akses pasar, sementara klien memberikan loyalitas dan kontinuitas pasokan hasil tangkapan.

Di satu sisi, hubungan ini memberikan rasa aman bagi nelayan, terutama pada periode paceklik ketika akses terhadap lembaga keuangan formal sangat terbatas. Di sisi lain, posisi tawar nelayan melemah karena harga dan skema pembayaran ditentukan oleh patron, sehingga sebagian besar nilai tambah ekonomi terkonsentrasi pada pengepul. Secara teoritik, relasi ini mencerminkan bentuk *linking social capital* yang bersifat inklusif setelah syarat (*conditional inclusion*), di mana akses ke sumber daya eksternal tersedia tetapi mengikat dan sulit dinegosiasikan ulang.

Implikasinya bagi pemberdayaan nelayan adalah perlunya intervensi yang tidak semata-mata berupaya memutus relasi patron–klien, melainkan secara gradual menciptakan alternatif jaringan ekonomi misalnya melalui koperasi nelayan, kelompok usaha bersama, atau kemitraan yang lebih adil sehingga nelayan memiliki pilihan dan dapat menegosiasikan ulang posisi mereka dalam struktur pasar. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi penguatan modal sosial kelembagaan lokal sebagai strategi keluar dari kemiskinan struktural di kawasan pesisir. Dengan demikian, interpretasi hasil-hasil ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa ketergantungan nelayan terhadap penagih utang tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya (Satria, Matsuda, and Sano 2006)

3. Modal Sosial dan Desain Pemberdayaan Berbasis Kebutuhan

Pemetaan kebutuhan sosial dan modal sosial menunjukkan bahwa kekuatan utama komunitas terletak pada dimensi *bonding social capital*: kerja sama, solidaritas, dan norma resiprositas yang meminimalkan konflik dan mendukung kelangsungan hidup sehari-hari. Temuan ini sejalan dengan studi modal sosial nelayan yang menekankan pentingnya kepercayaan dan norma dalam menjaga kohesi sosial.

Namun, kelemahan pada dimensi *bridging* dan *linking social capital* tercermin dari terbatasnya kerja sama dengan pihak eksternal dan dominannya relasi dengan pengepul membatasi kemampuan komunitas untuk mengonversi modal sosial menjadi peluang ekonomi dan politik yang lebih luas. Dibandingkan dengan studi penguatan modal sosial berbasis kelembagaan lokal yang berhasil membangun jejaring antara kelompok nelayan, pemerintah, dan pelaku wisata, kasus Sarang Tiung menunjukkan bahwa infrastruktur kelembagaan untuk memfasilitasi jaringan tersebut masih dalam tahap embrionik. Program literasi keuangan, misalnya, akan lebih efektif dilaksanakan pada musim panen ketika pendapatan relatif stabil, sehingga masyarakat memiliki waktu luang untuk mempelajari perencanaan keuangan dan menabung (Firdaus et al. 2015).

Oleh karena itu, hasil ini mengindikasikan bahwa strategi pemberdayaan yang relevan bukan hanya

memperkuat solidaritas internal—yang sebenarnya sudah tinggi—melainkan mengarahkan intervensi pada: (1) pembentukan dan penguatan lembaga ekonomi lokal (misalnya koperasi nelayan atau BUMDes wisata) yang dikelola secara partisipatif; (2) peningkatan kapasitas negosiasi dan literasi keuangan nelayan; serta (3) fasilitasi jejaring dengan mitra eksternal, termasuk pemerintah desa, perusahaan, dan lembaga keuangan mikro. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada modal sosial internal tanpa dukungan jaringan eksternal berpotensi membatasi peluang peningkatan kesejahteraan dalam jangka Panjang (Claridge Tristan 2018).

4. Implikasi Praktis: Diversifikasi Livelihood dan Pengembangan Pariwisata Berbasis Modal Sosial

Temuan mengenai kalender musiman dan potensi pariwisata menunjukkan peluang untuk mengembangkan strategi livelihood yang lebih adaptif. Waktu luang pada musim sepi dapat dimanfaatkan untuk aktivitas tambahan seperti pengolahan hasil laut, usaha kuliner pesisir, dan paket wisata edukasi yang melibatkan pengalaman melaut, wisata mangrove, dan atraksi budaya nelayan. Dalam kerangka modal sosial, keterlibatan perempuan dan pemuda dalam inisiatif pariwisata dapat memperluas jaringan sosial komunitas ke segmen pengunjung, pelaku usaha wisata, dan platform digital, sehingga memperkuat bridging social capital.

Peran lembaga lokal dan mitra eksternal menjadi krusial dalam tahap ini. Pemerintah desa dapat mengintegrasikan hasil pemetaan kebutuhan ke dalam rencana pembangunan desa dan alokasi anggaran, sementara PT Arutmin Indonesia–NPLCT berpotensi mendukung penguatan kelembagaan dan sarana wisata melalui program CSR yang berorientasi jangka menengah. Perguruan tinggi dapat berperan sebagai pendamping teknis dalam desain pelatihan, pengembangan paket wisata, dan monitoring perubahan kapasitas modal sosial komunitas. Model kolaborasi multipihak semacam ini telah direkomendasikan dalam berbagai studi pemberdayaan nelayan sebagai upaya untuk menghindari polarisasi sosial dan memperkuat daya tahan komunitas pesisir.

5. Kontribusi dan Keterbatasan

Secara konseptual, hasil ini menegaskan bahwa pemetaan sosial yang dipadukan dengan analisis modal sosial memberikan landasan penting untuk merancang intervensi pemberdayaan yang sensitif terhadap dinamika kerja sama, solidaritas, norma resiprositas, dan relasi patron–klien. Kasus Sarang Tiung memperkaya literatur dengan menunjukkan bagaimana modal sosial ikatan yang kuat dapat menjadi sumber daya sekaligus batasan, tergantung pada ada tidaknya kelembagaan dan jejaring yang mampu memperluas akses komunitas ke sumber daya eksternal. Pendekatan ini sejalan dengan konsep mata pencaharian adaptif dan ketahanan masyarakat, yang menekankan pentingnya fleksibilitas ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan (Zurek et al. 2022).

KESIMPULAN

Program pengabdian masyarakat berbasis modal sosial di Desa Sarang Tiung mengungkap bahwa kerentanan utama nelayan bersifat struktural, yakni kombinasi ketergantungan pada perantara, ketidakstabilan pendapatan akibat pola musim penangkapan, literasi keuangan yang rendah, dan kelembagaan ekonomi lokal yang lemah. Temuan ini menegaskan bahwa problem nelayan tidak dapat dijelaskan semata oleh kurangnya kemampuan individu, tetapi oleh konfigurasi relasi patron–klien dan ketiadaan lembaga kolektif yang mampu menegosiasikan posisi nelayan dalam struktur pasar.

Dari sisi modal sosial, program ini menunjukkan bahwa masyarakat Sarang Tiung memiliki bonding social capital yang kuat berupa kerja sama, solidaritas, dan norma resiprositas dalam kehidupan sehari-hari, namun bridging dan linking social capital masih terbatas dan cenderung terkonsentrasi pada hubungan dengan perantara. Melalui rangkaian PRA, FGD, dan pemetaan sosial dengan 12 partisipan kunci, program ini menghasilkan beberapa luaran awal yang terukur: (1) tersusunnya peta kebutuhan sosial dan peta kelembagaan yang disepakati bersama; (2) meningkatnya kesadaran kolektif mengenai risiko ketergantungan pada perantara dan perlunya kelembagaan nelayan; serta (3) munculnya inisiatif lokal untuk merumuskan paket wisata berbasis pengalaman dan gagasan pembentukan wadah kelembagaan ekonomi nelayan.

Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi dalam dua hal. Pertama, memperkaya kajian modal sosial nelayan dengan menunjukkan bagaimana kerja sama dan solidaritas internal yang kuat dapat berjalan bersamaan dengan relasi patron–klien yang menjerat, sehingga modal sosial dapat bersifat protektif sekaligus membatasi. Kedua, program ini mendemonstrasikan penggunaan pemetaan sosial dan kalender musiman sebagai alat untuk menghubungkan analisis modal sosial dengan perencanaan intervensi pemberdayaan, khususnya dalam penentuan waktu dan bentuk kegiatan yang sesuai dengan siklus livelihood nelayan.

Meski demikian, program ini memiliki keterbatasan. Pertama, intervensi masih berfokus pada pemetaan kebutuhan, peningkatan kesadaran, dan perumusan model awal, sehingga belum dapat mengukur perubahan jangka panjang pada pendapatan, struktur relasi patron–klien, atau kelembagaan formal nelayan. Kedua, jumlah peserta inti yang terlibat intensif relatif terbatas (12 orang), sehingga representasi kelompok-kelompok tertentu—seperti perempuan nelayan yang tidak terorganisir atau nelayan yang tidak tergabung dalam kelompok—masih perlu diperluas pada tahap lanjutan. Ketiga, belum dilakukan evaluasi kuantitatif terhadap indikator kesejahteraan ekonomi (misalnya perubahan pendapatan, aset, atau diversifikasi usaha) yang lazim digunakan dalam evaluasi program pemberdayaan nelayan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adger, W. Neil. 2003. "Social Capital, Collective Action, and Adaptation to Climate Change." *Economic Geography* 79(4):387–404. doi:10.1111/j.1944-8287.2003.tb00220.x.
- Azizah, Andi Azka, and Mohamad Thahir Haning. 2025. "Evaluasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Di Kabupaten Kepulauan Selayar." *Indonesian Journal of Intellectual Publication* 6(1):28–36. doi:10.51577/ijpublication.v6i1.823.
- Chambers, Robert. 1994. "Participatory Rural Appraisal (PRA): Analysis of Experience." *World Development* 22(9):1253–68. doi:10.1016/0305-750X(94)90003-5.
- Claridge Tristan. 2018. "Functions of Social Capital – Bonding, Bridging, Linking." *Social Capital Research*. doi:https://doi.org/10.5281/zenodo.7993853.
- Didi, La. 2022. "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR (PENDEKATAN, TEORI DAN KONSEP)." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(2):77–84.
- FAO. 2015. *Voluntary Guidelines for Securing Sustainable Small-Scale Fisheries in the Context of Food Security and Poverty Eradication*. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Firdaus, Maulana, Tenny Apriliani, and Rizki Aprilian Wijaya. 2015. "PENGELUARAN RUMAH TANGGA NELAYAN DAN KAITANNYA DENGAN KEMISKINAN: Kasus Di Desa Ketapang Barat, Kabupaten Sampang, Jawa Timur." *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan* 8(1):49. doi:10.15578/jsekp.v8i1.1195.
- Handoko, Denis Kurniawan Dwi, Fitriyana Fitriyana, and Heru Susilo. 2022. "KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI HUBUNGAN PATRON KLIEN PADA MASYARAKAT NELAYAN PURSE SEINE DI KELURAHAN BERBAS PANTAI KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG." *Jurnal Perikanan Unram* 12(3):408–17. doi:10.29303/jp.v12i3.347.
- Indrawasih R. 2018. "Relasi Patron–Klien Dalam Komunitas Nelayan: Analisis Struktur Sosial Dan Ekonomi." *Antropologi Indonesia* 39(1):104–31.
- Kusnadi. 2000. *Nelayan: Strategi Adaptasi Dan Jaringan Sosial*. humaniora utama press.
- Lin, Nan. 2017. "Building a Network Theory of Social Capital." Pp. 3–28 in *Social Capital*. Vol. 50. Routledge.
- Petter M. Kettner, Robert M. Moroney, and Lawrence L. Martin. 2017. *Designing and Managing Programs: An Effectiveness-Based Approach*. 5th ed. Sage Publications.
- Prapti, Kanthi Pangestuning. 2021. "Coastal Community Empowerment Strategy in Jember Regency." *Journal of Aquaculture Science* 6(1IS):245–60. doi:10.31093/joas.v6i1IS.178.
- Putnam, Robert D. 1995. "Bowling Alone: America's Declining Social Capital." *Journal of Democracy* 6(1):65–78. doi:10.1353/jod.1995.0002.
- Putnam, Robert D. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. berilustrasi. New York: Simon and Schuster.
- Rabbaniyah, Lathiefah, Mayang Riyantie, Eka Dewi Utari, Bayu Suhendry, Siti Fatimah Zahra, Alfonsus Liguori Pramudya, and Sri Lestari. 2025. "Financial Management Training For Fishermen In Indramayu To Support Blue Economy Implementation." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPMM)* 9(1):117–30. doi:10.21009/JPMM.009.1.10.
- Risdiana Putri, Windy Dwi Widyassalfa, Restu Afrianto Rahman, Ratih Pratiwi, and M. Ricza Irhami. 2024. "Strategi Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Pengelolaan Sumber Daya Manusia : Studi Kasus Di Kawasan Pantai Benteng Portugis, Kabupaten Jepara." *Aliansi : Jurnal Manajemen Dan Bisnis* 19(2):140–48. doi:10.46975/nd0k9316.
- Rogers, Todd, Ellen C. Feighery, Elaine M. Tencati, Judith L. Butler, and Linda Weiner. 1995. "Community Mobilization to Reduce Point-of-Purchase Advertising of Tobacco Products." *Health Education Quarterly* 22(4):427–42. doi:10.1177/109019819502200402.
- Satria Arif. 2015. *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Satria, Arif, Yoshiaki Matsuda, and Masaaki Sano. 2006. "Contractual Solution to the Tragedy of Property Right in Coastal Fisheries." *Marine Policy* 30(3):226–36. doi:10.1016/j.marpol.2005.01.003.
- Wibowo, Agung, Suwanto, Joko Winarno, and Putri Permatasari. 2025. "Pemberdayaan Nelayan

- Tradisional Dalam Menghadapi Perubahan Sosial Di Kabupaten Pacitan.” *Jurnal Penyuluhan* 21(01):102–16. doi:10.25015/21202557462.
- Woolcock, M., and D. Narayan. 2000. “Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy.” *The World Bank Research Observer* 15(2):225–49. doi:10.1093/wbro/15.2.225.
- Zurek, Monika, John Ingram, Angelina Sanderson Bellamy, Conor Goold, Christopher Lyon, Peter Alexander, Andrew Barnes, Daniel P. Bebbler, Tom D. Breeze, Ann Bruce, Lisa M. Collins, Jessica Davies, Bob Doherty, Jonathan Ensor, Sofia C. Franco, Andrea Gatto, Tim Hess, Chrysa Lamprinopoulou, Lingxuan Liu, Magnus Merkle, Lisa Norton, Tom Oliver, Jeff Ollerton, Simon Potts, Mark S. Reed, Chloe Sutcliffe, and Paul J. A. Withers. 2022. “Food System Resilience: Concepts, Issues, and Challenges.” *Annual Review of Environment and Resources* 47(1):511–34. doi:10.1146/annurev-environ-112320-050744.